

Hery Bachrizal Tanjung

Abstract: *Participatory rural development is a strategic issue; however it's difficult to be implemented. All this time, participation is just be considered as people will to support the development. According to the Goverment and NGOs have tried to build an expectation to Pesantren to promote participatory rural development. The purpose of this paper is to analyze the potential of pesantren to develop participatory approach in rural development. The paper conludes that pesantren could follow the recent information and cutting- edge technology as well as participatory rural development.*

Kata kunci : Partisipasi, Pembangunan, Pesantren

Pendahuluan

Partisipasi dalam pembangunan tetap menjadi isu yang strategis dan perlu ditekuni oleh pengelola pemerintahan di Indonesia, karena kenyataan empiris masih menunjukkan pendekatan pembangunan selama ini belum sepenuhnya mampu merangsang timbulnya partisipasi masyarakat secara luas. Apa-lagi jika pembangunan hanya didasarkan pada asumsi ekonomi rasional dan perhitungan kuantitatif, yang menimbulkan kesan bahwa seluruh isu pembangunan dapat diatasi dalam pigura bersifat teknokratik dan strategi atas bawah. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sering hanya mudah diucapkan namun sulit dalam implementasi, karena partisipasi rakyat dalam pembangunan itu sesungguhnya adalah bentuk pembaruan kebudayaan politik yang memberikan ruang bagi prakarsa rakyat, padahal makna partisipasi yang difahami selama ini adalah adanya kemauan rakyat untuk mendukung pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah (Soetrisno, 1995).

Pesantren memiliki sejarah yang panjang dan berumur tua serta luasnya penyebaran, maka dapat difahami jika lembaga pendidikan ini memberi pengaruh

sangat besar kepada masyarakat sekitarnya (Kuntowijoyo, 1998). Kartodirdjo (1978) mencatat, banyak peristiwa sejarah abad 19 yang menunjukkan betapa besar pengaruh pesantren dalam mobilisasi masyarakat pedesaan untuk aksi-aksi protes terhadap kekuasaan birokrasi kolonial di pedesaan. Dengan asumsi yang sama, Kuntowijoyo (1998) melihat pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat mencoba meletakkan harapan pada pesantren dalam usaha memajukan pembangunan pedesaan dengan pendekatan partisipasi; dengan terlebih dahulu mencermati watak dan ciri barunya agar dapat menolong analisis sosialnya. Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis potensi pesantren, berdasarkan pengalaman empirisnya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan.

Definisi dan Pandangan atas Partisipasi

Soetrisno (1995) menyatakan, ada dua definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, yaitu: (a) partisipasi sebagai bentuk dukungan rakyat dalam rencana pembangunan yang dirancang dan diten-tukan, dimana ukuran tinggi rendahnya

partisipasi dapat dilihat dari kemauan rakyat menanggung biaya pembangunan, baik dalam bentuk uang atau tenaga; (b) partisipasi merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai, dimana ukuran tinggi rendahnya partisipasi tidak hanya dilihat dari kemauan rakyat menanggung biaya pembangunan, tetapi dari ada atau tidaknya hak rakyat menentukan arah dan tujuan pembangunan, serta ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Sosiolog pembangunan masyarakat de Guzman (1989) memandang partisipasi dalam beberapa bentuk, yaitu: (a) hak rakyat, (b) aksi kelompok, (c) bagian esensial dari proses administrasi pembangunan, dan (d) satu indikator pembangunan pedesaan. Sedangkan bagi ahli penyuluhan pembangunan, Slamet (1992, 2003) partisipasi tidak hanya berarti pengerahan tenaga kerja rakyat secara sukarela tetapi justru yang lebih penting tergeraknya rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan yang tersedia melalui pembangunan guna memperbaiki kualitas hidupnya sendiri. Kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan harus didahului *proses belajar* untuk memperoleh dan memahami informasi serta memprosesnya menjadi pengetahuan tentang adanya sejumlah kesempatan bagi dirinya, kemudian melatih dirinya agar mampu berbuat dan termotivasi untuk bertindak. Jika rakyat telah bertindak menuju perbaikan kehidupannya, barulah dapat dikatakan rakyat telah berpartisipasi dalam pembangunan (Slamet, 1992; 2003 dan Sumardjo, 1999).

Catatan Kecil tentang Pembangunan

Soetrisno (1995) menyatakan bahwa di negara-negara berkembang,

juga termasuk Indonesia, pernah muncul gejala di mana pemerintah menempatkan pembangunan bukan lagi sebagai tugas rutin, tetapi telah diangkat sebagai satu ideology baru negara. Aspek positifnya adalah, pembangunan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pelestariannya harus dijaga oleh semua warga negara; akan tetapi aspek negatifnya pembangunan menjadi sesuatu yang suci, serta tidak bebas dikritik dan dikaji ulang guna mencari alternatif, bahkan aparat negara menjadi sangat reaktif terhadap kritik yang muncul dari siapapun dan menempatkannya sebagai oposisi pemerintah. Padahal sebenarnya kritik adalah salah satu manifestasi dari partisipasi. Tentu saja lukisan kondisi tersebut sudah tidak berlaku lagi sekarang, karena negara Indonesia telah menjadi negara yang demokratis.

Hal menarik lainnya adalah, ternyata pilihan terhadap jenis partisipasi rakyat dalam pembangunan akan mempengaruhi model perencanaan yang dipilih oleh pihak perencana pembangunan dan pelemagaan sistemnya. Jika mobilisasi rakyat dipilih sebagai definisi partisipasi, maka model perencanaan yang muncul adalah perencanaan mekanistik, yang memandang fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah keadaan, dan menempatkan perencana sebagai ahli yang menciptakan “cetak biru” perubahan, yang harus diikuti oleh rakyat sesuai dengan buku petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Sudah pasti sesungguhnya model perencanaan ini tidak partisipatif dan tidak demokratis. Jika definisi partisipasi rakyat dalam pembangunan itu ialah bentuk kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai, maka model perencanaan yang muncul adalah *human action planning model*, yang menekankan peranan perencanaan sebagai usaha sistematisasi aspirasi pem-

bangunan yang ada di masyarakat dan menyusunnya ke dalam dokumen tertulis.

Mungkin merupakan gejala universal bahwa setiap elit politik negara atau pemerintah terhadap rakyatnya adalah seperti bapak terhadap anaknya. Sebagai bapak, dia merasa wajib terus membantu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh anaknya atau rakyatnya. Namun tanpa disadari, nilai dan orientasi seperti ini akan menjadi kendala untuk bangkitnya kemauan rakyat berpartisipasi dalam pembangunan. Bahkan akan muncul rasa ketidakmampuan di kalangan rakyat dan sekaligus ketergantungan kepada pemerintah untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Padahal pembangunan menuntut adanya proses belajar menuju kemampuan rakyat guna memecahkan masalah mereka secara mandiri, tetapi paternalisme tidak memberi kesempatan untuk hal itu.

Untuk mengatasi budaya paternalisme di dalam suatu kelembagaan masyarakat, menurut Soetrisno (1995) dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang dapat menciptakan antusiasme di kalangan anggota kelembagaan tersebut, agar percaya terhadap kemampuan mereka menyelesaikan masalah secara mandiri. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk membangkitkan antusiasme, yaitu: (a) pemimpin kelembagaan masyarakat harus memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk ikut menentukan jenis program dan tujuannya, (b) pemimpin kelembagaan mau dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan dialogis agar dapat menumbuhkan kreatifitas para anggota untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Agar kelembagaan masyarakat dapat menjalankan dua fungsi tersebut dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat budaya demokrasi di kalangan aparat pelaksanaannya. Kebangkitan antusiasme rakyat itu pada dasarnya adalah motivasi rakyat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan masyarakat khususnya di pedesaan, bukan lagi persoalan mau atau tidak mau, tetapi bagaimana melalui partisipasi tersebut rakyat memperoleh manfaat sosial ekonomi dari pembangunan itu.

Nilai Dasar Pesantren

Mastuhu (1989) menyatakan, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Tujuan dari pendidikan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh kepribadian, mencintai ilmu untuk mengembangkan kepribadian muhsin, serta menegakkan dan menyebarkan agama dan kerjayaan umat Islam di tengah masyarakat. Selain sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal (baik dalam bentuk madrasah, sekolah umum, maupun perguruan tinggi), pesantren juga merupakan suatu komunitas tersendiri yang memiliki unsur-unsur orangnya, perangkat keras dan perangkat lunak, sistem nilai dan kebutuhan bersama, serta interaksi sesama dalam satuan waktu tertentu. Pelaku utama pesantren adalah kiai atau ulama, para ustadz dan ustadzah, para pengurus pelaksana, dan para santri. Kiai adalah tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren, dimana semua warga pesantren tunduk kepada kiai dan berusaha keras melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya.

Nilai yang mendasari pesantren ada dua kelompok, yaitu: (a) nilai-nilai agama yang mengandung kebenaran

mutlak, bercorak fikih sufiistik dan berorientasi kepada kehidupan akhirat, dan (b) nilai-nilai kehidupan yang memiliki kebenaran relatif, bercorak empirik dan pragmatis untuk memecahkan berbagai masalah kehidupan dengan tetap merujuk kepada hukum agama. Wahid (1987) melihat pesantren sebagai lingkungan pendidikan yang integral dan sekaligus sub kultur dalam masyarakat Indonesia. Tiga elemen yang membentuk pesantren sebagai sub kultur, yaitu: (a) pola kepemimpinan pesantren yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara, (b) kitab-kitab klasik sebagai rujukan umum, dan (c) sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.

Wahid (1987) menjelaskan, kepemimpinan kiai-kiai di pesantren sangat unik karena memakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara kiai-ulama-santri dibangun atas dasar kepercayaan, bukan karena patron-klien sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Ketaatan santri kepada kiai ulama lebih dikarenakan mengharapakan barkah (*grace*) seperti difahami dari konsep sufi. Konsep kepemimpinan seperti ini sering dianggap mengabaikan usaha modernisasi pesantren di masa depan. Elemen ke dua, adalah memelihara dan mentransfer literatur-literatur atau kitab-kitab klasik umum dari generasi ke generasi, dimana hanya ulama-ulama besar yang memiliki otoritas untuk menginterpretasi dua sumber pokok Islam. Dengan cara ini, pesantren adalah model bagi pencarian pengetahuan masyarakat muslim. Masyarakat juga memandang pesantren sebagai komunitas yang ideal dalam mengembangkan perilaku kehidupan berlandaskan moral keagamaan. Elemen ketiga adalah keunikan sistem nilai yang bertumpu pada pemahaman literal tentang ajaran Islam, namun dalam kenyataan praktis, sistem nilai tidak dapat dipisahkan dengan elemen lain yaitu kepemimpinan kiai-ulama di satu sisi dan penggunaan literatur yang

dipakai pada sisi lain melalui pelemagaan ajaran Islam dalam praktek kehidupan kiai-ulama dan santri sehari-hari, sekaligus sebagai bentuk legitimasi pada kepemimpinan kiai-ulama dan literatur tersebut. Mastuhu (1989) mencatat beberapa prinsip pendidikan pesantren yang sekaligus telah menjadi nilai kehidupan santri sehari-hari, yaitu: teosentris, sukarela dan mengabdikan, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, kebebasan yang dipimpin, mandiri, serta mencari dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan.

Perkembangan pesantren telah dimulai sejak awal abad 20, meliputi kurikulum, metode mengajar, dan kelembagaan. Perkembangan kurikulum dimulai sejak 1906 ketika kerajaan Jawa mendirikan Mambaul 'Ulum tempat mendidik calon-calon pejabat agama, dengan memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan umum ke dalam pendidikan agama itu; ternyata perkembangan serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Dalam metode mengajar ada perkembangan dari sistem *salaf* ke sistem *madrasi*. Sistem *salaf* adalah metode mengajar secara tradisional dengan *sorogan* (bimbingan individu), dan *bondongan* (semacam kuliah umum). Dalam sistem *salaf* tidak ada pembagian tingkatan kemajuan belajar, karena setiap santri menentukan sendiri menentukan sendiri kemajuannya dengan menunjukkan kemampuan penguasaan buku-buku kepada kiai secara perorangan. Sistem *madrasi* yang sudah di kenal di Sumatera Barat sejak tahun 1907 dan di pesantren Jawa pada tahun 1920, diberlakukan sistem kelas atau tingkatan kemajuan belajar (Kuntowijoyo, 1998).

Pada era 1960-an ada perkembangan baru ketika banyak pesantren yang dilembagakan atau berbadan hukum yayasan, dimana biasanya akan ada beberapa orang teknokrat di dalam struktur organisasi dan itu artinya kiai bukan lagi satu-satunya penguasa di pesantren tersebut, bahkan mungkin hanya berfungsi simbolis. Pesantren Asy-

Syafi'iyah di Jakarta telah mempunyai badan hukum yayasan sejak tahun 1963, mempunyai pengurus dengan pembagian kerja yang terinci: yang mengasuh jenjang pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga universitas. Demikian juga Pesantren Salafiah Suafi'iyah Sukarejo Situbondo Jawa Timur telah berbadan hukum yayasan sejak tahun 1970, yang juga mengasuh jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga universitas.

Interaksi Pesantren dan Pembangunan Pedesaan

Pesantren bukan lagi hanya lembaga tingkat desa, tetapi telah menjangkau perkotaan atau setidaknya daerah batas kota. Besar kecilnya pesantren (setidaknya ditandai dengan jumlah dan asal daerah santri) dan sistem pendidikannya, akan mempengaruhi hubungan antara pesantren dan desa. Ketika jumlah santri masih sedikit dan berasal dari desa sekitar, pesantren sepenuhnya sebagai lembaga tingkat desa, namun ketika jumlah santri semakin besar dan berasal dari beragam daerah bahkan dari luar negeri, maka pesantren akan berdiri sendiri dan lepas dari desa. Kuntowijoyo (1998) menyatakan, biasanya perjalanan pesantren akan melewati tiga fase, yaitu: (a) fase pesantren masih terpadu dengan desa, (b) kemudian mulai terpisah dari desanya, dan (c) akhirnya pesantren menjadi lembaga yang mungkin saja terasing dari desanya.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat riwayat pertumbuhan Pondok Pesantren Darussalam di Banyuwangi, yang didirikan tahun 1951 hanya dengan sebuah Mushalla kecil, sebagai tempat kiai-ulama mengajarkan kitab-kitab dan sekaligus tempat bermalam para santri. Kemudian pesantren tumbuh secara pelan-pelan dengan usaha para santri mengumpulkan dan membuat bahan bangunan (batu sungai, kayu hutan, dan batu bata) untuk membangun lokal belajar atau bangunan pesantren, yang mendapat bantuan dari

penduduk desa. Pesantren terus berkembang dengan jumlah santri yang semakin meningkat dan memilih bentuk sekolah, namun uniknya sampai tahun 1985 masih menggunakan sistem *salafi* dengan *bandongan* juga. Pesantren Darussalam juga aktif dalam pembinaan pengetahuan dan keterampilan santri pada isu-isu selain mata pelajaran agama, seperti manajemen, perpustakaan, kesehatan, teknologi tepat guna, dsb. Kerjasama pesantren dengan lembaga di luar desa, seperti LP3ES Jakarta dan LKNU pusat telah menempatkan persantren sebagai lembaga yang berada di atas desa. Barangkali hanya kesamaan agama dan "tingkat ekonomi" para santri dengan masyarakat sekitar yang tetap mengikat pesantren dengan desa tersebut.

Contoh lain, adalah Pondok Pesantren Pabelan, Muntilan Jawa Tengah, yang lahir di tahun 1965 atas prakarsa dan musyawarah para tokoh masyarakat desa. Pada mulanya pesantren ini hanya tempat kursus keterampilan pemuda dan pengajian masyarakat desa, yang pembiayaannya ditopang dengan usaha pengumpulan beras oleh penduduk setempat, kemudian tumbuh berkembang sehingga di tahun 1985 pesantren dihuni oleh 1280 orang santri dan diasuh oleh 75 orang guru. Pesantren Pabelan memiliki hubungan dengan dunia luar, seperti ITB dan LP3ES; namun demikian pesantren tetap berusaha menjadi bagian dari desa dengan meniadakan jarak fisik dan psikis (Hidayat, 1985). Untuk kasus ini, menurut Kuntowijoyo (1998), pengelolaan pesantren tersebut memang terpisah dari kelembagaan desa, tetapi ada usaha yang keras dari pesantren untuk tidak lepas secara fungsional dari desa.

Lain halnya dengan Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur (terkenal dengan nama Pondok Modern Gontor) yang secara struktural memang bukan bagian dari desanya. Rahardjo (1982) menyebut Pondok Gontor ini sebagai sebuah *enclave* di

tengah-tengah masyarakat pedesaan. Cita-cita sejak berdirinya pesantren ini memang bukan semacam pesantren level desa biasa, dengan sistem pengajaran bukan *salafi* seperti kebanyakan pesantren di Jawa Timur, tetapi merujuk pada model Universitas Al-Azhar di Mesir (yang terkenal sebagai kubu intelektual dunia Islam) dan pola sistem *boarding and full day school* seperti sekolah-asrama di banyak negara Eropa; serta juga memiliki sejumlah tanah wakaf seluas 230 hektar dan usaha-usaha pertanian untuk pengabdian pada masyarakat yang tersebar di seluruh Jawa Timur (Shai-fullah, 1982). Santri Pesantren Gontor tidak hanya berasal dari desa setempat tetapi dari seluruh daerah Indonesia bahkan luar negeri, dan kebanyakan dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Dengan kondisi demikian, Pesantren Gontor dapat disebut sebagai pesantren yang terasing secara struktural dari desa (Kuntowijoyo, 1998).

Namun, pemisahan struktural tidak selalu juga berarti berpisah secara fungsional antara pesantren dan desa setempat. Pengalaman empirik menunjukkan pesantren tetap memiliki hubungan fungsional dengan desa-desa sekitar melalui pendidikan agama (setidaknya melalui dakwah di masjid setempat) dan kegiatan sosial ekonomi. Prasojo (1982) menyebut ada tiga macam pelayanan pesantren kepada masyarakat sekitar, yaitu: (a) kegiatan *tablig* atau ceramah umum tentang agama Islam kepada masyarakat yang dilakukan di dalam lingkungan pesantren, (b) kegiatan *majlis ta'lim* atau pengajian agama Islam yang lebih intensif kepada masyarakat umum, dan (c) bimbingan *hikmah* atau nasihat kiai-ulama kepada orang-orang yang datang berkunjung ke pesantren. Selanjutnya disebut oleh Prasojo, hampir semua elemen pesantren (kiai, ulama, ustadz, santri, dan fisik sarana-prasarana dan peralatan operasional pesantren) biasanya memiliki kaitan atau hubungan fungsional dengan masyarakat desa. Hubungan fungsional tersebut biasanya

dimulai dengan sumbangan desa kepada tahap penumbuhan pesantren, tetapi kemudian jika saatnya tiba akan terjadi sumbangan pesantren kepada desa. Pesantren adalah sumber banyak hal bagi masyarakat desa-desa sekitar, antara lain : (a) sumber pengetahuan agama dan umum, (b) sumber tumbuhnya para elit/pemimpin desa bahkan nasional, (c) tempat memperoleh manfaat sosial ekonomi (misal, operasional Pesantren Gontor pada tahun 1982 telah menyerap tidak kurang dari 350 orang tenaga kerja yang berasal dari desa sekitar, serta menumbuhkan banyak sekali usaha makanan ringan/ jajanan, dan transportasi local), serta (d) berperan sebagai agen pembaruan dan pembangunan desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pedesaan telah dilakukan oleh banyak pesantren dengan berbagai cara yang tentu sesuai dengan kondisi masyarakat. Pesantren An-Nuqayah, Guluk-guluk, Jawa Timur telah mengantarkan desanya menjadi desa swasembada beras pada tahun 1981, pesantrennya sendiri memperoleh Kalpataru pada tahun yang sama; setelah pesantren mendirikan Biro Pengembangan Masyarakat pada tahun 1979. Pesantren contoh berikutnya adalah Pesantren Maslakul Huda di desa Kajen, Pati, Jawa Tengah: setelah dua orang santri seniornya mengikuti latihan tentang pembangunan masyarakat dan menularkan gagasan itu kepada seluruh elemen pesantren yang direspon secara positif, dan dibuktikan dengan membentuk Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat pada tahun 1980, berfungsi mengkoordinasikan program pengembangan kelompok swadaya masyarakat di 13 desa sekitar pesantren (Mudatsir, 1985). Usaha-usaha nyata yang telah dilakukan pesantren adalah penghijauan desa dengan pohon buah-buahan, penataan lingkungan, usaha bersama simpan pinjam, usaha kesehatan masyarakat, dan program teknologi tepat guna. Kuntowijoyo (1988) menyatakan, contoh Pesantren Maslakul

Huda menunjukkan, jika ada sentuhan dari luar, pesantren bersikap positif terhadap pembangunan desa dan sanggup menjadi perantara yang baik dalam penyebaran gagasan ke masyarakat bawah. Keterbukaan pesantren terhadap dunia luar tentu tergantung dari kepribadian pengasuhnya dan pendekatan dari dunia luar ke pesantren.

Dalam bidang ekonomi, salah satu contoh yang tepat adalah Pesantren Darul Falah, Ciampea, Bogor; yang lahir tahun 1960 di atas tanah 20,5 hektar, dengan badan hukum yayasan. Sejak mula, pesantren memang telah memberi pelajaran campuran antara ilmu agama, pengetahuan umum, ilmu-ilmu pertanian, peternakan, perikanan, pascapanen, teknik irigasi, dan teknologi tepat guna, teknik bangunan dan mesin. Sebagai pesantren yang tidak memiliki akar tradisi di desa, Darul Falah tidak berkembang menjadi *enclave* di tengah desa, dibuktikan kegiatan pendidikan non formal (kursus, pelatihan dan penyuluhan) yang dikelola bersama masyarakat sekitar, mengembangkan kelompok - kelompok masyarakat, ikutserta memperbaiki prasarana desa, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pedagang perantara dan konsumen dari produksi pertanian yang dihasilkan pesantren (Widodo, 1982). Sebagai lembaga ekonomi, koperasi juga menjadi wadah dan ajang pembelajaran penting di pesantren Darul Falah dan banyak pesantren untuk melayani keperluan mereka sendiri dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pesantren juga memberi perhatian tinggi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu contoh baik adalah Pesantren An-Nuqayah yang terletak di daerah sulit air (waktu itu) di Madura, telah membangun pompa hidran dan pompa tali untuk mengalirkan air yang berasal dari bukit-bukit melalui pipa sehingga bisa menyediakan air untuk 15 desa sekitar. Atas prestasi tersebut, Pesantren An-Nuqayah mendapat

Kalpataru untuk penyelamatan lingkungan (Basyuni, 1985). Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan tahun 1984 juga diperoleh Pondok Pesantren Hidayatullah, Gunung Tambak Kalimantan Timur. Pesantren Hidayatullah dibuka sejak tahun 1974 secara bertahap oleh para alumni Pesantren Gontor; dan melalui rangkaian pengajiannya sang kiai mampu meyakinkan masyarakat sekitar tentang pentingnya pembangunan desa mereka. Bersama masyarakat desa sekitar, pesantren telah membangun pemukiman penduduk, merubah rawa-rawa menjadi tambak ikan dan udang, membangun bendungan untuk mengalirkan air ke sawah-sawah masyarakat sehingga secara perlahan dapat merubah kebiasaan masyarakat dalam pertanian ber-pindah menjadi pertanian menetap. Sarana pendidikan yang sangat luas dan lengkap dibangun permanen yang mampu menampung santri lebih dari 6000 orang, termasuk anak-anak yatim dan penyandang cacat. Apa yang telah dilakukan Pesantren Hidayatullah adalah contoh spektakuler tentang *community development* lengkap berbasis ekologi untuk keadilan sosial (sebagaimana dilukiskan oleh Ife, 1995), yang semuanya dimulai hampir dari titik nol (Yacub, 1985).

Kemandirian Pesantren dan Pemikiran Pembangunan Pedesaan

Kuntowijoyo (1998) dan banyak pakar pembangunan pedesaan lainnya (antara lain, Korten, 1984; Norman, 1988; Soetrisno, 1995; Ife, 1995) menyatakan terdapat beberapa kecenderungan baru tentang pemikiran atau konsep pembangunan pedesaan, diantaranya ialah *people centered development*, *selfreliance*, *institution development*, *value boriented development*, dan *sustainable development*. Konsep *people centered development* dari David Korten (1984) adalah pendekatan pembangunan pedesaan yang memandang penting inisiatif kreatif masyarakat seba-

gai sumberdaya utama pembangunan, dan menekankan kesejahteraan material-spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Pendekatan ini jelas sangat berbeda dengan pendekatan *production centered development* yang berusaha untuk lebih banyak mengejar pencapaian produksi yang melimpah produk-produk pangan dan sandang untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat pesat; tetapi pencapaian produksi itu seringkali dilakukan melalui cara yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip partisipasi, kesamaan dan kelestarian sumberdaya. Dari pengalaman empirik yang ada, pesantren tampaknya dapat didorong sebagai salah satu model pelaksanaan pembangunan pedesaan dengan konsep *people-centered development*.

Konsep *institution development* lebih menekankan pada pembangunan kelembagaan sosial sebagai norma pengatur dan akomodasi serta penggerak pembangunan pedesaan. Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai kelembagaan sosial sebagai kontributor nilai sekaligus penggerak pembangunan pedesaan, mengingat potensi cakupan operasional dan pengaruhnya dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, pesantren mempunyai dan sekaligus dimiliki oleh lingkungan sosialnya. Sedangkan konsep *value oriented development* yang dekat dengan pemikiran Waberman tentang perlunya etika sosial dalam pembangunan. Pembangunan yang digerakkan berdasarkan dan berorientasi nilai adalah seluruh program dan aktivitas pembangunan yang lahir atas dorongan nilai atau yang mendapat pembenaran dari khazanah nilai yang hidup dalam masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang memiliki nilai-nilai luhur, antara lain: teosentris, sukarela dan mengabdikan, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, kebebasan yang terdipimpin, mandiri, serta mengapli-

kasikan ilmu pengetahuan (Mastuhu, 1989) tentu sangat potensial sebagai sumber nilai untuk menggerakkan pembangunan pedesaan. Asumsi-nya adalah, pembangunan yang mempertimbangkan nilai-nilai luhur tersebut akan lebih berakar di dalam masyarakat, jika dan hanya jika nilai-nilai itu hidup dan aplikatif di tengah masyarakat dan tidak terbatas hanya di dalam pesantren.

Konsep *self reliance* atau kemandirian masyarakat, kemungkinan adalah pemikiran yang sangat berkembang dewasa ini dalam pembangunan pedesaan. Kemandirian diartikan sebagai potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri, mewujudkan sumberdaya lokal, dan rakyat sebagai pelaku utama dan pengambil keputusan terbesar dari usaha-usaha pembangunan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki dan menerapkan nilai kemandirian dalam operasional serta menjalin hubungan struktural dan fungsional dengan masyarakat desa tentu memiliki kapasitas untuk mengembangkan kemandirian bagi dirinya sendiri dan (potensi) bagi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Akhirnya, semua konsep pembangunan yang dijelaskan singkat di atas, sangat berhubungan dan dalam rangka mewujudkan konsep *sustainable development*, yang ditandai dengan adanya kemampuan (masyarakat dan gerak pembangunan itu sendiri) untuk mewujudkan sustainability atau keberlanjutan pembangunan. Pengembangan nilai dan sumberdaya lokal, ramah lingkungan ekologis kelembagaan sosial, dan berorientasi rakyat adalah upaya-upaya yang seharusnya terus dilakukan sehingga pembangunan mempunyai kemampuan untuk berlanjut atas dasar partisipasi masyarakatnya sendiri. Pesantren pada umumnya terbukti memiliki tingkat keberlanjutan operasional yang sangat tinggi dan banyak menghasilkan lulusan yang juga mempunyai jiwa kemandirian dan kewirausahaan yang kuat untuk mengembangkan potensi dirinya di tengah masya-

rakat. Dengan demikian, pesantren dapat dikatakan potensial dalam hal sebagai penggerak pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

Memang tidak semua pesantren terlibat dalam pembangunan pedesaan. Pesantren-pesantren *salafi* yang tradisional kebanyakan tidak memiliki cukup sumberdaya manusia dalam usaha mereka berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan. Namun, kontribusi mereka tentu saja sangat besar dalam pendidikan masyarakat secara spiritual, moral dan kultural. Pesantren Modern Gontor juga tidak banyak terlibat dalam pembangunan desa, dengan alasan ingin menghasilkan lulusan yang potensial tumbuh berkembang menjadi ulama, dan bukan untuk menghasilkan petani-wirausaha muslim. Namun, menurut Kuntowijoyo (1988) sekarang ada kecenderungan besar di banyak pesantren untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan santri tentang bagaimana hidup secara lebih mandiri di tengah masyarakat. Dengan sentuhan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang berada di luar sistem pesantren, yang telah banyak menjalankan dan mewujudkan pemikiran mutakhir pembangunan pedesaan, maka pesantren diharapkan akan dapat pula ikut menggerakkan dan mewujudkan pembangunan pedesaan berdasarkan pemikiran mutakhir yang berkembang tersebut. Lebih penting lagi, pesantren diharapkan dapat memberikan makna yang lebih mendalam terhadap pembangunan pedesaan dengan meletakkan gerak pembangunan itu di dalam kerangka pemikiran masyarakatnya.

Membaca kemandirian dan basis massa pesantren, van Bruinessen yang dikutip oleh Wahid (1999) percaya, di dalam tubuh pesantren terkandung potensi penting untuk mewujudkan *civil society* sebagai pilar penting demokrasi di Indonesia. Lebih jauh, Wahid menegaskan pesantren telah mengalami banyak perubahan yang sangat fundamental,

tetapi perubahan itu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit dan tersimpan; dan arena watak otentiknya yang cenderung menolak pemusatan/sentralisasi pemerintahan, bahkan pesantren adalah komunitas yang sangat terdesentralisasi dan berposisi di tengah masyarakat pedesaan, maka pesantren sangat dapat diharapkan memainkan peran signifikan dan efektif dalam pemberdayaan dan transformasi masyarakat. Catatan-catatan pembangunan yang hanya dijadikan proyek dan bisnis dengan wajah kapitalis-birokrat yang dilingkari semangat nepotisme yang sangat kuat, telah menjadikan praktek-prektek penyimpangan ekonomi-politik menjadi tidak terkendali lagi. Sehingga pembangunan hanya menguntungkan kelompok kecil elit ekonomi-politik dan kalangan lain yang turut menghambakan kepada penyimpangan pembangunan tersebut. Sementara itu sebagian besar kelompok masyarakat menjadi terbelakang, miskin, marjinal dan tidak memiliki akses terhadap sumberdaya untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi-politik yang produktif dan mencukupi. Pada golongan masyarakat termarginalkan inilah sesungguhnya terletak wilayah penghidmatan bagi pesantren melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan kemudian transformasi masyarakat (yang dilengkapi dengan nilai-nilai luhur pesantren) secara lebih luas.

Jika kesempatan sejarah ini tidak diambil dan diperankan secara tepat, proporsional dan efektif, maka diduga akan muncul etatisme dan elitisme gaya baru di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. (mungkin dewasa ini tahun 2011 gejala tersebut semakin nyata adanya). Atau memang harus berlaku apa yang menjadi pandangan Kuntowijoyo (1998) yang menyatakan, peranan pesantren tentu bukan tanpa batas; sepanjang menyangkut pembangunan dengan konteks pedesaan, agraris, dan teknologi sederhana, maka pesantren merupakan

tempat persemaian yang baik. Santri dan lembaga pesantren sendiri merupakan agen yang sesuai dengan tingkat kemajuan seperti itu.

Kesimpulan

Pesantren telah melakukan kerja-kerja pengembangan masyarakat dan pembangunan pedesaan, namun yang telah ada sekarang itu, hendaknya jangan dijadikan model yang terlalu ideal apalagi menjadi mitos tanpa uji coba atau pembelajaran lokal lebih dahulu, jika akan diduplikasi lebih luas, karena pembangunan menuju masyarakat industri memerlukan lembaga yang lebih memadai. Pikiran dan konsep sederhana dan “kecil itu indah” harus diimbangi dengan pikiran dan konsep yang tinggi, besar dan sistematis. Catatan ini justru menekankan pentingnya peran pesantren dalam pembangunan masyarakat pedesaan, dan bukan sebaliknya, melalui lembaga-lembaga pengabdian masyarakat yang khusus dibentuk untuk itu, dengan mampu mengikuti perkembangan pemikiran mutakhir tentang pembangunan pedesaan. Demikian !

Daftar Pustaka

- Basyuni, Ison. 1985. Da'wah bil Hal Gaya Pesantren. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- De Guzman, Pablo. 1989. *People Participation : A Stimulus for Effecting and Sustaining Improvements in Farmers Communities*. Laguna, Philipina: Peper Presented in the 22nd Regional Training on DSPC, SE-ARCA.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Hadimulyo. 1985. Dua Pesantren, Dua Wajah Budaya. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Komaruddin. 1985. *Pesantren dan Elit Desa*. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Ife, Jim. 1985. *Community Development : Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman Australia Pty Ltd.
- Kartodirdjo, Sartono. 1978. *Pro-test Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kuntowijoyo. 1998. Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa : Potret Sebuah Dinamika. Dalam Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Madjid, Abdul. T. 1990. *Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Ketramampilan Pertanian*. Bogor: Thesis Pasca sarjana IPB.
- Mudatsir, Arief. 1985. Kajian Desa Pesantren. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Munajat, Imam. 1991. *Peranan Pesantren dalam Pembangunan Pedesaan*. Thesis Pasca sarjana. Bogor: IPB.
- Mastuhu. 1989. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Bogor: Disertasi FPS IPB.
- Pesantren: *Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Prasojo, Soedjoko, et all. 1982. “Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falah dan Delapan Pesantren lainnya di Bogor”. Jakarta: LP3ES.
- Sahidu, Arifuddin. 1998. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi PPS Bogor: IPB.

- Shaifullah, Ali. H. A. 1982. Darussalam, Pondok Pesantren Gontor. Dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno, Loeman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Uphoff, Norman. 1988. *Partisipasi*. Dalam Michael M Cernea (editor). *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Van Dusseldorp, D. B. W, M. 1981. *Participation in Planned Development Influenced by Government of Developing Countries at Local Level in Rural Areas*. UnPublished.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Pesantren di lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberdayaan*. dalam M. Wahid, Suwendi, dan S. Zuhri. *Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Widodo, Saleh. M. 1982. *Pesantren Darul Falah: Eksperimen Pesantren Pertanian*. dalam M. D. Rahardjo (editor). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: LP3ES.
- Yakub, H. M. 1985. *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Angkas